ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kota Bandung yang berjumlah 14 dinas. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi *Person Product Moment*, koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pemerintah Kota Bandung pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari Manajemen dalam hal ini berhubungan dengan Sumber Daya Manusia masi belum memenuhi kriteria baik, karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah dan dirasakan Kurangnya tenaga akuntan. Dan kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut diimbangi dengan Kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung yaitu sebasar 55%.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas